

**RENCANA TINDAK  
PENGENDALIAN (RTP)  
TAHUN 2022**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP maka Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan SPIP. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau Kota (SKPD/SKPK) di Lingkungan Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan SPIP secara komprehensif dan sistematis dan oleh sebab itu perlu untuk menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2022.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfo Tahun 2022 memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Resiko Indeks (MRI) yang memuat uraian tentang upaya Diskominfo dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Banda Aceh untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi. Secara umum, RTP Diskominfo Tahun 2022 meliputi:

1. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan Unit Kerja;
2. Penguatan di lingkungan pengendalian;
3. Pemetaan resiko yang dihadapi di dalam pencapaian tujuan dan sasaran;

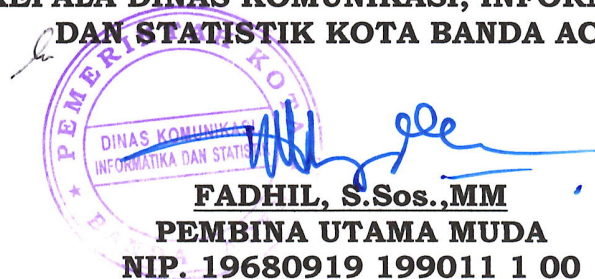


4. Penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi yang bertindak untuk mengendalikan resiko;
5. Pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan
6. Pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

Dokumen RTP Diskominfotik Tahun 2022 ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Banda Aceh dan akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada instansi pemerintahan. Dari Dokumen RTP ini diharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 12 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**FADHIL, S.Sos.,MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19680919 199011 1 00**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ..... iii

BAB I    PENDAHULUAN ..... 1

    1.1. Latar Belakang ..... 1

    1.2. Dasar Hukum ..... 2

    1.3. Tujuan ..... 2

    1.4. Manfaat..... 3

    1.5. Ruang Lingkup..... 3

BAB II    SEKILAS TENTANG SPIP

    2.1. Pengertian SPIP..... 4

    2.2. Tujuan SPIP ..... 4

    2.3. Unsur-Unsur dalam SPIP ..... 5

BAB III    PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN TINGKAT UNIT  
KERJA YANG DIHARAPKAN

    3.1. Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern  
        Diskominfotik Tahun 2022 ..... 7

    3.2. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian..... 11

    3.3. Analisis Resiko ..... 24

    3.4. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan ..... 31

    3.5. Informasi dan Komunikasi ..... 33

    3.6. Pemantauan dan Evaluasi ..... 34

BAB IV    PENUTUP ..... 37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkan nya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan *Good Governance* melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara yang disebutkan dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh di dalam



penyelenggaraan tugas pokok Pemerintahan Kota Banda Aceh. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik di dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh.

### **1.2. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dan
5. Perwal Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Resiko pada OPD di lingkungan Pemkot Banda Aceh.

### **1.3. Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh.

#### **1.4. Manfaat**

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Pengelolaan aset dan keuangan dapat diselenggarakan secara handal, dan
5. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

#### **1.5. Ruang Lingkup**

Rencana Tindak Pengendalian Diskominfo ini berfokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ditingkat Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian ini melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian ini diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2022.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **0.1. Pengertian SPIP**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) diamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

SPIP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa SPIP tersebut melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (*never ending process*) oleh pimpinan dan seluruh pegawai pada instansi pemerintahan.

#### **0.2. Tujuan SPIP**

PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan Bupati atau Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.



SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi terhadap pencapaian atas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Unsur-Unsur dalam SPIP**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur yang melekat padanya dimana hal tersebut dalam SPIP telah diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu :

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

#### **2. Penilaian Resiko**

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian resiko yang mencakup identifikasi resiko dan analisis resiko, baik resiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun resiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintahan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok atau tupoksi dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses penilaian resiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para *stakeholders*.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemantauan SPIP dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.

**BAB III**  
**PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN TINGKAT UNIT**  
**KERJA YANG DIHARAPKAN**

**3.1. Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Diskominfo  
Tahun 2022**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2022 yang berisi prioritasi Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dinilai kemungkinan terjadinya resiko. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menghasilkan RTP ini adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Diskominfo Tahun 2022

Rekapitulasi dilakukan melalui pengisian kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) oleh Pejabat Struktural Diskominfo yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan empat orang Kepala Bidang yang terdapat pada Diskominfo. Kuesioner CEE ini berisi delapan kategori pertanyaan lingkungan pengendalian Intern yang kemudian dilakukan pemberian nilai (*scoring*).

2. Melakukan Penilaian (*scoring*) Berdasarkan Jawaban Para Responden

Penilaian (*scoring*) dilakukan berdasarkan jawaban yang diberikan atas pertanyaan pada sub unsur lingkungan pengendalian. Skala penilaian bisa dilihat pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1 Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan  
Pengendalian

No	Skor	Keterangan Jawaban	Simpulan Jawaban
1	1	Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun	Kurang Memadai
2	2	Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten	
3	3	Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan	Memadai
4	4	Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain	

Berdasarkan jawaban yang dihimpun dari Kuesioner CEE yang telah diberikan, didapat penilaian terhadap pengendalian lingkungan Diskominfo Kota Banda Aceh yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hasil Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan  
Pengendalian

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai

6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Diskominfotik

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern sehingga mampu mendorong terciptanya kualitas perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan survey yang sudah dilakukan diperoleh beberapa simpulan Survey Persepsi berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh pejabat struktural Diskominfotik Kota Banda Aceh yang bisa dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Simpulan Survey Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh

N o.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Has il	Ura ian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	-	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	-	-	Kurang Memadai	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan	Kurang Memadai	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan

				Kurang Memadai	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala	Kurang Memadai	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala
3	Kepemimpinan yang kondusif	-	-	Kurang Memadai	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan	Kurang Memadai	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan
				Kurang Memadai	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan	Kurang Memadai	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan
				Kurang Memadai	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas	Kurang Memadai	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas
				Kurang Memadai	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko	Kurang Memadai	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Kurang Memadai	Masih banyaknya pegawai yang bersifat adhoc (sementara/pegawai kontrak)	Kurang Memadai	Masih banyaknya pegawai yang bersifat adhoc (sementara/pegawai kontrak)
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	-	-	Memadai	-	Memadai	-
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	-



3.2. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya kinerja Diskominfo melalui Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Tahapan yang dilakukan untuk melakukan tahapan ini adalah :

- 1. Penetapan Konteks Resiko Strategis Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh

Tahun 2022 Diskominfo menetapkan prioritas untuk menetapkan konteks resiko yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banda Aceh, Diskominfo menetapkan Tujuan, Sasaran dan IKU yang mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh beserta resiko yang akan muncul yang bisa dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Penetapan Konteks Resiko Strategis Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C / U C	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.22.16.19.01	Walikota Banda Aceh	Rendahnya Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemerintahan Berbasis Elektronik	Internal	C	1. Tidak Efesiennya Belanja TIK 2. Pengelolaan TIK Secara Sendiri-sendiri (Silo) 3. Tidak terintegrasinya Sistem Informasi/Aplikasi Pemerintah Kota Banda Aceh	Walikota, OPD Terkait, Masyarakat

2. Penetapan Konteks Resiko Strategis Diskominfo Kota Banda Aceh

Berdasarkan penetapan konteks resiko strategis Pemko Banda Aceh, Diskominfo menetapkan Tujuan, Sasaran, IKU yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo yang akan dilakukan Penilaian Resiko Strategis dan berdasarkan hasil penilaian atas resiko strategis Diskominfo Kota Banda Aceh, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani yang bisa dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Penetapan Konteks Resiko Strategis Diskominfo Kota Banda Aceh

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh									
	Sasaran Strategis 1 : Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Minimnya Data Statistik Sektoral yang tersedia dan bisa dikelola oleh Diskominfo	RSO.2 2.20.1 9.01	Kadis Kominfo	Belum bakunya standar data yang digunakan serta kurangnya petugas ahli	Internal	C	Tidak tersedianya data statistik sektoral yang lengkap, baku dan terbaru	Masyarakat dan Pemko Banda Aceh
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	1. Persentase Website OPD yang Aktif	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.2 2.16.1 9.02	Kadis Kominfo	OPD kurang aktif di dalam melakukan update berita dan informasi	Internal	C	Informasi kinerja OPD dan Pemerintah Kota yang bisa diterima oleh masyarakat	Masyarakat dan Pemko Banda Aceh

						melalui website yang dikelola			akutidak update	
		2. Cakupan Layanan E-Governm ent yang dilaksanakan	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunika si di OPD	RSO.2 2.16.1 9.03	Kadis Komi nfo tik	Terba tasny a SDM , Saran a dan Prasa rana TIK serta lemah nya koord inasi dan Integr asi TIK	Intern al	C	Tidak tercapai nya target Indeks Pengelo laan Sistem Peme ri ntahan Berbasi s Elektro nik (SPBE) Peme ri ntah Kota	Pemko Banda Aceh

3. Penetapan Konteks Resiko Operasional Diskominfo Kota Banda Aceh

Berdasarkan penetapan konteks resiko strategis Diskominfo Kota Banda Aceh, maka ditetapkan konteks resiko operasional yang didasarkan kepada Rencana Kerja (Renja) Diskominfo dan berdasarkan hasil penilaian atas resiko strategis Diskominfo Kota Banda Aceh, terdapat resiko-resiko operasional yang menjadi prioritas untuk ditangani yang bisa dilihat pada Tabel 3.6.



Tabel 3.6 Penetapan Konteks Resiko Operasional Diskominfo Kota Banda Aceh

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko yang Teridentifikasi				Penyebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.01	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo tik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.02		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.03		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurang baiknya respon yang diberikan terhadap aspirasi atau pengaduan	ROO.22.16.19.04		Evaluasi hanya dilakukan saat ada aspirasi atau pengaduan saja			Respon yang diberikan kepada warga tidak memuaskan	
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.05	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo tik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.06		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	

			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19.07		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur		Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Minimnya keberagaman jumlah topik dan tema konten berita, informasi publik dan liputan sangat terbatas dan kurang menarik	R00.22.16.19.08		Jumlah tenaga jurnalis/rilis/de sain grafis yang dimiliki terbatas		Jumlah rilis berita, informasi dan liputan tidak mencapai target	
3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.22.16.19.09	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.22.16.19.10		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait Informasi Publik		Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19.11		Kurangnya SDM di dalam mengelola permohonan informasi publik yang diterima		Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan permohonan informasi publik	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses verifikasi dan respon permohonan informasi publik	R00.22.16.19.12		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas permohonan informasi publik		Informasi publik yang dimohon tidak lengkap direspon, diverifikasi dan diberikan	

4	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.13	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo tik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.14		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait informasi yang harus didesiminasikan			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.15		Kurangnya SDM di dalam mendesiminasikan informasi			Tidak terpenuhinya target laporan informasi yang didesiminasikan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Terbatasnya pemahaman dan tenaga SDM di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan	ROO.22.16.19.16		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas media yang digunakan			Kurang maksimal di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan	
5	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh Informasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.17	Kadis Kominfotik/Kabid Smart City	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo tik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.18		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan sosialisasi			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	



			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19.19		Kurangnya SDM di dalam melakukan proses pelaporan pelaksanaan sosialisasi			Tidak terpenuhinya target pelaksanaan sosialisasi	
			Pemantauan dan Evaluasi	Belum maksimalnya kriteria penetapan lokasi yang akan dilakukan sosialisasi	R00.22.16.19.20		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas lokasi sosialisasi			Target lokasi yang dipilih sebagai tempat sosialisasi tidak sesuai dengan sasaran	
6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.22.16.19.21	Kadis Kominfotik/Kabid Smart City	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.22.16.19.22		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD dan stakeholder lainnya terkait pelaksanaan pelatihan			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19.23		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target pelaksanaan pelatihan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Adanya pembatasan prosesi pelatihan secara tatap muka	R00.22.16.19.24		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas SDM yang diberikan pelatihan			Tidak terlaksananya prosesi pelatihan SDM	

7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.22.16.19.25	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo tik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	R00.22.16.19.26		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD dan stakeholder lainnya terkait pelaksanaan pelatihan KIG			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19.27		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target pelaksanaan pelatihan KIG	
			Pemantauan dan Evaluasi	Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pelatihan KIG	R00.22.16.19.28		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas KIG yang diberikan pelatihan			Anggaran tidak terserap secara maksimal	
8	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.22.16.19.29	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo tik dan OPD
			Perencanaan	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan layanan jaringan intra	R00.22.16.19.30		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait dengan layanan jaringan intra yang diberikan			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	

			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.31		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target layanan jaringan intra yang diberikan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Adanya pembatasan terkait dengan pemeliharaan layanan jaringan intra	ROO.22.16.19.32		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas jaringan intra yang diberikan			Layanan Jaringan Intra belum maksimal	
9	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.33	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo tik dan OPD
			Perencanaan	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan dokumen proses bisnis yang harus disiapkan	ROO.22.16.19.34		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait dengan pembuatan proses bisnis			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.35		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target dokumen proses bisnis yang disiapkan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Proses Bisnis yang harus disiapkan tidak bisa diselesaikan	ROO.22.16.19.36		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas aplikasi yang dibuat			SDM Pemda tidak mampu untuk membuat dokumen proses bisnis	
10	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.37	Kadis Kominfotik/Kabid E-	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Ekstern	C	Terhambatnya proses keseluruhan	Diskominfo tik dan OPD



	Daerah	Operasional Pusat Data				Government		al		terkait pertanggungjawa ban anggaran	
			Perencanaan	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan pusat data yang harus disiapkan	R00.22.16.19 .38		Kurangnya perencanaan spesifikasi pusat data yang sesuai dengan standar			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19 .39		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target standar pusat data yang diharapkan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Pemeliharaan pusat data yang dimiliki kurang maksimal	R00.22.16.19 .40		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada layanan pusat data yang diberikan			Layanan pusat data yang dimiliki tidak maksimal digunakan oleh OPD	
1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	Pertanggungjawa ban	Pertanggungjawa ban tidak tepat waktu	R00.22.16.19 .41	Kadis Kominfotik/Ka bid E- Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Ekstern al	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawa ban anggaran	Diskominfo tik dan OPD
			Perencanaan	Masih rendahnya kualitas perencanaan SPBE	R00.22.16.19 .42		Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan kelengkapan dokumen arsitektur SPBE Kota			Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dengan perencanaan Arsitektur TIK Kota	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19 .43		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Kota Dokumen Perencanaan tidak matang dan terstruktur	

			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak terpenuhinya target dokumen arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	ROO.22.16.19.44		Minimnya pemahaman OPD terkait dengan dokumen arsitektur SPBE			Kondisi sarana dan Prasarana TIK yang dimiliki OPD tidak sesuai dengan standar yang direncanakan / ditetapkan	
1 2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.45	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo tik dan OPD
			Perencanaan	Perencanaan pengembangan aplikasi khusus tidak lengkap	ROO.22.16.19.46		Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dengan prosedur dan kelengkapan pengembangan aplikasi khusus			Aplikasi khusus yang dikembangkan tidak memiliki dokumen perencanaan	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.47		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Tidak terpenuhinya target aplikasi khusus yang sesuai standar	
			Pemantauan dan Evaluasi	masih banyak OPD yang tidak layak di dalam mengembangkan aplikasi khusus	ROO.22.16.19.48		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada jumlah aplikasi khusus yang dikembangkan			Aplikasi khusus yang dikembangkan tidak sesuai standar	
1 3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.49	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo tik dan OPD

	dan Kota Cerdas		Perencanaan	Dokumen Perencanaan penguatan command center Kota Banda Aceh tidak lengkap	ROO.22.16.19.50		Kurangnya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal prosedur dan kelengkapan Penguatan Command Center Kota			Command Center Kota tidak memiliki dasar perencanaan yang lengkap	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.51		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Penyerapan anggaran tidak maksimal	
			Pemantauan dan Evaluasi	Command Center Kota belum memenuhi standar yang diharapkan	ROO.22.16.19.52		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada pengadaan sarana tanpa pertimbangan standar yang diharapkan			Tidak terpenuhinya target penguatan command center kota sesuai standar	
1 4	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.53	Kadis Kominfotik/Kabid Statistik	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurangnya pemahaman akan mutu integrasi statistik daerah	ROO.22.16.19.54		Kurangnya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal peningkatan perencanaan mutu integrasi statistik daerah			Rendahnya kualitas mutu dokumen perencanaan yang dilaksanakan	
			Pelaporan	Laporan tidak	ROO.22.16.19		Dokumen			Penyerapan	



				lengkap	.55		Pelaksanaan tidak lengkap			anggaran tidak maksimal	
			Pemantauan dan Evaluasi	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang bertugas di dalam proses integrasi mutu statistik daerah	R00.22.16.19 .56		Belum maksimalnya bimtek yang diberikan kepada SDM integrasi statistik daerah			OPD tidak mampu di dalam melengkapi mutu integrasi data statistik daerah yang diharapkan	
15	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.22.16.19 .57	Kadis Kominfotik/Kabid Statistik	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Belum terpenuhinya OPD yang menyerahkan dataset yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	R00.22.16.19 .58		Belum maksimalnya peran dan fungsi forum data			Belum optimalnya pengelolaan, integrasi dan pengambilan keputusan melalui data sektoral	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19 .59		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Penyerapan anggaran tidak maksimal	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurangnya pemahaman terhadap dataset yang dimiliki	R00.22.16.19 .60		Belum maksimalnya bimtek yang diberikan kepada OPD terkait dengan proses verifikasi, validasi, analisis dan update dataset yang dimiliki			Dataset OPD tidak bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	

Adapun Daftar Resiko Teridentifikasi bisa dilihat pada Form Lampiran.

**3.3. Analisis Resiko**

Penetapan hasil analisis resiko mengacu pada dua parameter, yaitu besarnya dampak dan kemungkinan frekuensi terjadinya resiko yang terdiri dari dua parameter. Parameter pertama yaitu besarnya dampak/konsekuensi dan parameter kedua yaitu kemungkinan frekuensi terjadinya resiko. Level resiko kemungkinan pada Diskominfo Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 3.7, sementara level resiko dampak bisa dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.7 Level Resiko Kemungkinan Diskominfo Kota Banda Aceh

Skala	Level Resiko	Kemungkinan
1	Sangat jarang	1. Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan 2. Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol 3. Mungkin terjadi sekali dalam 25 Tahun
2	Jarang	1. Probabilitas kurang daripada 50% tetapi masih cukup tinggi 2. Mungkin terjadi dalam 10 Tahun
3	Sering	1. Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 2. Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat sering	1. Kemungkinan terjadi > 50% 2. Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Tabel 3.8 Level Resiko Dampak Diskominfo Kota Banda Aceh

Skala	Level Resiko	Dampak
1	Rendah Sekali	1. Cukup mengganggu jalannya pelayanan 2. Menimbulkan kerusakan kecil 3. Kerugian diatas Rp25.000.000 s.d Rp100.000.000,00 4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp100 juta 5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi



		<p>meskipun tidak signifikan</p> <p>6. Berdampak pada pandangan negatif thd institusi dlm skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)</p> <p>7. Adanya kerusakan kecil thd lingkungan</p>
2	Rendah	<p>1. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan</p> <p>2. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan kerusakan serius</p> <p>3. Kerugian diatas Rp100.000.000 s.d Rp500.000.000,00</p> <p>4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp500 juta</p> <p>5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan</p> <p>6. Berdampak pada pandangan negatif thd institusi dlm skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media nasional)</p> <p>7. Adanya kerusakan cukup besar thd lingkungan</p>
3	Tinggi	<p>1. Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu</p> <p>2. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama</p> <p>3. Kerugian diatas Rp500.000.000 s.d Rp1.000.000.000,00</p> <p>4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00</p> <p>5. Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>6. Merusak citra institusi dlm skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>7. Adanya kerusakan besar thd lingkungan</p>



4	Tinggi Sekali	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu</li><li>2. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama</li><li>3. Kerusakan fatal</li><li>4. Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000.000,00</li><li>5. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp2.000.000.000,00</li><li>6. Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan</li><li>7. Merusak citra institusi dlm skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak</li><li>8. Terjadinya KKN dan diproses secara hukum</li></ol>
---	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analisis resiko dilakukan dengan *Focused Group Discussion* (FGD) kepada responden yang mewakili unsur pimpinan dan pejabat struktural Diskominfotik Kota Banda Aceh. Hasil analisis atas resiko-resiko tersebut memperlihatkan peta atau matriks resiko yang bisa dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Peta/Matriks Resiko Diskominfo Kota Banda Aceh

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Rendah Sekali	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Sangat Sering	4			RSP.21.16.19.01, RSO.21.20.19.03	ROO.21.16.19.08, ROO.21.16.19.44, ROO.21.16.19.58
	Sering	3		ROO.21.16.19.01, ROO.21.16.19.04, ROO.21.16.19.05	RSO.21.20.19.01, ROO.21.16.19.32, ROO.21.16.19.52, ROO.21.16.19.54	RSO.21.16.19.02,
	Jarang	2	ROO.21.16.19.49	ROO.21.16.19.02, ROO.21.16.19.03, ROO.21.16.19.06, ROO.21.16.19.07, ROO.21.16.19.09, ROO.21.16.19.10, ROO.21.16.19.11, ROO.21.16.19.12, ROO.21.16.19.13, ROO.21.16.19.14, ROO.21.16.19.15, ROO.21.16.19.16, ROO.21.16.19.17, ROO.21.16.19.18, ROO.21.16.19.19, ROO.21.16.19.20, ROO.21.16.19.21, ROO.21.16.19.22, ROO.21.16.19.23, ROO.21.16.19.24, ROO.21.16.19.25, ROO.21.16.19.26, ROO.21.16.19.27, ROO.21.16.19.28, ROO.21.16.19.30, ROO.21.16.19.31, ROO.21.16.19.33, ROO.21.16.19.35, ROO.21.16.19.36, ROO.21.16.19.37, ROO.21.16.19.38, ROO.21.16.19.40, ROO.21.16.19.41, ROO.21.16.19.42, ROO.21.16.19.43, ROO.21.16.19.45, ROO.21.16.19.46, ROO.21.16.19.47, ROO.21.16.19.48, ROO.21.16.19.50, ROO.21.16.19.51, ROO.21.16.19.53, ROO.21.16.19.56, ROO.21.16.19.57, ROO.21.16.19.59, ROO.21.16.19.60	ROO.21.16.19.55	ROO.21.16.19.34
	Sangat jarang	1		ROO.21.16.19.29, ROO.21.16.19.39		

Keterangan :	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi Sekali
--------------	---------------	--------	--------	---------------

Dari peta resiko di atas dapat disimpulkan bahwa:

1.
- Terdapat 6 resiko yang mempunyai level sangat tinggi dimana kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut sangat sering dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi yaitu:

a.

Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah (RSP.21.16.19.01);

b.

Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update (RSO.21.16.19.02);



- c. Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD (RSO.21.16.19.03);
  - d. Minimnya keberagaman jumlah topik dan tema konten berita, informasi publik dan liputan sangat terbatas dan kurang menarik (ROO.21.16.19.08),
  - e. Tidak terpenuhinya target dokumen arsitektur SPBE yang telah ditetapkan (ROO.22.16.19.44), dan
  - f. Belum terpenuhinya OPD yang menyerahkan dataset yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate (ROO.21.16.19.58).
2. Terdapat 9 resiko yang mempunyai level tinggi yang berarti kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut sering dan dampak yang ditimbulkan tinggi, yaitu resiko:
- a. Minimnya Data Statistik Sektoral yang tersedia dan bisa dikelola oleh Diskominfo (RSO.21.20.19.01);
  - b. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.22.16.19.01);
  - c. Kurang baiknya respon yang diberikan terhadap aspirasi atau pengaduan (ROO.22.16.19.04);
  - d. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.22.16.19.05);
  - e. Adanya pembatasan terkait dengan pemeliharaan layanan jaringan intra (ROO.22.16.19.32);
  - f. Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan dokumen proses bisnis yang harus disiapkan (ROO.22.16.19.34);
  - g. Command Center Kota belum memenuhi standar yang diharapkan (ROO.22.16.19.52);
  - h. Kurangnya pemahaman akan mutu integrasi statistik daerah (ROO.22.16.19.54), dan
  - i. Laporan tidak lengkap (ROO.22.16.19.55)
3. Terdapat 49 resiko yang mempunyai level rendah yang berarti kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut jarang dan dampak yang ditimbulkan rendah, yaitu resiko:



- a. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.02);
- b. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.03);
- c. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.06);
- d. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.07);
- e. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.09);
- f. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.10);
- g. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.11);
- h. Kurangnya tenaga SDM di dalam proses verifikasi dan respon permohonan informasi public (ROO.21.16.19.12);
- i. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.13);
- j. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.14);
- k. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.15);
- l. Terbatasnya pemahaman dan tenaga SDM di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan (ROO.21.16.19.16);
- m. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.17)
- n. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.18);
- o. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.19);
- p. Belum maksimalnya kriteria penetapan lokasi yang akan dilakukan sosialisasi (ROO.21.16.19.20);
- q. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.21);
- r. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.22);
- s. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.23);
- t. Adanya pembatasan prosesi pelatihan secara tatap muka (ROO.21.16.19.24);
- u. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.25);
- v. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab (ROO.21.16.19.26);
- w. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.27);

- x. Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pelatihan KIG (ROO.21.16.19.28);
- y. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.22.16.19.29);
- z. Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan layanan jaringan intra (ROO.21.16.19.30);
- aa. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.31);
- bb. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.33);
- cc. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.35);
- dd. Proses Bisnis yang harus disiapkan tidak bisa diselesaikan (ROO.21.16.19.36);
- ee. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.37);
- ff. Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan pusat data yang harus disiapkan (ROO.21.16.19.38);
- gg. Laporan tidak lengkap (ROO.22.16.19.39);
- hh. Pemeliharaan pusat data yang dimiliki kurang maksimal (ROO.21.16.19.40);
- ii. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.41);
- jj. Masih rendahnya kualitas perencanaan SPBE (ROO.22.16.19.42);
- kk. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.43);
- ll. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.45);
- mm. Perencanaan pengembangan aplikasi khusus tidak lengkap (ROO.21.16.19.46);
- nn. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.47);
- oo. masih banyak OPD yang tidak layak di dalam mengembangkan aplikasi khusus (ROO.21.16.19.48);
- pp. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.22.16.19.49);
- qq. Dokumen Perencanaan penguatan command center Kota Banda Aceh tidak lengkap (ROO.21.16.19.50);
- rr. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.51);
- ss. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.53);
- tt. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang bertugas di dalam proses integrasi mutu statistik daerah (ROO.21.16.19.56);
- uu. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.57)

- vv. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.59);
  - ww. Belum maksimalnya dataset OPD yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate (ROO.21.16.19.60);
4. Terdapat 3 resiko yang mempunyai level sangat rendah yang berarti kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut sangat jarang dan dampak yang ditimbulkan rendah sekali, yaitu resiko:
- a. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.29);
  - b. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.39);
  - c. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.49);

**3.4. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan resiko, kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan masih dibutuhkan kegiatan pengendalian baru untuk dilakukan. Perencanaan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab resiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila resiko benar-benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang sudah ada dan masih dibutuhkan bisa dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Kegiatan Pengendalian yang Sudah Ada dan Masih Dibutuhkan

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangun gg Jawab	Target Waktu Penyel esaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh						
1	Nilai Indeks Pemerintah an Berbasis Elektronik Rendah	RSP.22.1 6.19.01	Pembuatan Form Evaluasi Pelaksanaan Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih rendahnya kepatuhan Implementasi Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara an Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Koordinato r SPBE Kota Banda Aceh (Sekda) 2. Kepala Dinas Kominfotik 3. OPD Terkait	Triwula n II



				Pemerintahan Berbasis Elektronik			
<b>II Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>							
1	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.22.16.19.02	Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih banyak SKPD yang kurang aktif di dalam melakukan update website	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	Kadis Kominfotik	Triwulan II
2	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.22.16.19.03	Pembuatan Dokumen Arsitektur SPBE dan Dokumen Proses Bisnis Aplikasi Khusus yang Dimiliki	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih banyak aspek SPBE yang belum terpenuhi / dilaksanakan	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP, Evaluasi Arsitektur SPBE Kota Banda Aceh yang lengkap	Kadis Kominfotik	Triwulan II
<b>II I Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>							
1	Minimnya keberagaman jumlah topik dan tema konten berita, informasi publik dan liputan sangat terbatas dan kurang menarik	ROO.22.16.19.08	Pengajuan Telaahan Staf pengadaan tenaga jurnalis/rilis/desain grafis konten informasi publik	Lambatnya proses rekomendasi dari Pimpinan/OPD terkait untuk perekrutan tenaga jurnalis/rilis/desain grafis konten informasi publik untuk memperbanyak, meningkatkan kualitas informasi publik	Koordinasi ulang kepada Pimpinan serta memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Bagian Prokopim Pemko Banda Aceh	Kabid PIP	Triwulan II
2	Tidak terpenuhinya target dokumen arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	ROO.22.16.19.44	Pembuatan Peraturan Walikota Banda Aceh terkait dengan implementasi Dokumen Arsitektur dan peta rencana SPBE serta membentuk Tim SPBE Kota Banda Aceh	Masih lambat proses pembahasan / finalisasi Peraturan Walikota Banda Aceh terkait penyelenggaraan Arsitektur SPBE Kota Banda Aceh	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	Kabid E-Government	Triwulan III
3	Belum terpenuhinya OPD yang menyerahkan dataset yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	ROO.22.16.19.58	Pembuatan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Banda Aceh	Lambatnya penentuan pemilik data dan jenis data sektoral OPD	Melakukan workshop penentuan pemilik dan jenis data Kota Banda Aceh	Kabid Statistik	Triwulan II

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi resiko bisa dilihat pada form lampiran.

3.5. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang sudah dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun yang direncanakan bisa dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Pengkomunikasian Atas kegiatan Pengendalian yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Peraturan Walikota 4. Keputusan Walikota 5. Workshop/Seminar 6. Bimtek 7. Sosialisasi 8. Website/Portal	Diskominfo tik, OPD Terkait	Kemenpan-RB, Pemerintah Aceh, Walikota, OPD Terkait, Masyarakat, Komunitas	Triwulan II	April 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat
2	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Keputusan Walikota 4. Workshop 5. Bimtek 6. Sosialisasi 7. Website	Diskominfo tik	SKPD, Masyarakat, Komunitas	Triwulan II	Juni 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat
3	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP, Evaluasi Arsitektur SPBE Kota Banda Aceh yang lengkap	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Workshop 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Laporan	Diskominfo tik	SKPD, Komunitas	Triwulan II	Mei 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat dan finalisasi dokumen



4	Koordinasi ulang kepada Pimpinan serta memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Bagian Prokopim Pemko Banda Aceh	1. Surat 2.Rapat Koordinasi 3. Workshop 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Website	Diskominfo tik	SKPD, Komunitas, Masyarakat	Triwulan II	Juni 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dan Dokumentasi berupa notulen
5	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	1. Surat 2.Rapat Koordinasi 3. Keputusan Walikota 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Laporan	Diskominfo tik	SKPD	Triwulan III	September 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat dan finalisasi laporan
6	Melakukan workshop penentuan pemilik dan jenis data Kota Banda Aceh	1. Surat 2.Rapat Koordinasi 3. Bimtek 4. Usulan Koordinator Forum Data 5. Keputusan Walikota 6. Sosialisasi 7. Laporan	Diskominfo tik	SKPD	Triwulan II	April 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat dan finalisasi laporan

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian bisa dilihat pada form lampiran.

### 3.6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi resiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

#### 1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan, meliputi evaluasi, supervisi dan



revisi. Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bisa dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Sekretaris Daerah (Koordinator SPBE)	Maret, Mei, Oktober, Desember 2022	Maret, Mei, Oktober, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
2	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kadis Kominfotik	April, Oktober, Desember 2022	April, Oktober, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
3	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP, Evaluasi Arsitektur SPBE Kota Banda Aceh yang lengkap	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kadis Kominfotik	April, Oktober, Desember 2022	April, Oktober, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
4	Koordinasi ulang kepada Pimpinan serta memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Bagian Prokopim Pemko Banda Aceh	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kabid PIP	Mei, November, Desember 2022	Mei, November, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
5	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kabid E-Government	Mei, November, Desember 2022	Mei, November, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
6	Melakukan workshop penentuan pemilik dan jenis data Kota Banda Aceh	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kabid Statistik	Mei, November, Desember 2022	Mei, November, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian bisa dilihat pada form lampiran.

2. Evaluasi Terpisah
- Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut  
Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tindak lanjutnya.
4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP  
Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Walikota Banda Aceh.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Intern Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penting pada penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Resiko Indeks (MRI) dalam rangka mewujudkan proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Diskominfo untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai dengan RTP yang telah ditetapkan ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan kebijakan pertanggungjawaban atau *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfo Tahun 2022 menjadi sangat penting artinya dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Diskominfo Kota Banda Aceh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.



KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Tahun Penilaian : 2022

NO.		JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	4	4	3	3	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	4	4	3	3	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								KURANG MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	2	4	3	3	3	3	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	2	3	3	2	3	2	KURANG MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	2	3	2	3	3	3	MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	1	2	3	2	2	2	KURANG MEMADAI
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	2	2	3	3	2	2	KURANG MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	2	2	2	3	3	2	2	KURANG MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	4	4	3	3	MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	4	3	4	4	3	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	4	3	4	3	3	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading )	3	3	4	4	3	4	3	MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	3	2	3	3	2	2	KURANG MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	2	2	3	4	2	2	KURANG MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								KURANG MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	4	3	4	3	3	MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	3	4	4	3	MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	2	2	3	3	4	4	2	KURANG MEMADAI
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	2	3	3	3	3	3	MEMADAI
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	3	3	4	3	MEMADAI



2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	4	3	3	4	3	MEMADAI
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	4	3	3	4	3	MEMADAI
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	4	3	3	4	3	MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	4	3	2	3	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	4	3	4	4	3	MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	2	3	3	3	3	3	MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	4	3	4	4	3	MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	2	4	3	2	4	3	MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF								MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	4	3	3	4	3	MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	4	3	3	4	3	MEMADAI
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	2	2	3	3	3	3	3	MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	4	3	3	4	3	MEMADAI
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	4	4	3	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	2	3	3	4	3	3	MEMADAI

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik





Fadhil S.Sos.MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

### Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Tahun Penilaian : 2022

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Daftar Urutan Kepangkatan Dinas	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan	Komitmen terhadap kompetensi
2	RKA/DPA	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala	Komitmen terhadap kompetensi
3	Dokumen/Data Dukung RTP Dinas	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan	Kepemimpinan yang Kondusif
4	Dokumen/Data Dukung RTP Dinas	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan	Kepemimpinan yang Kondusif
5	Rencana Strategis, Rencana Kerja Dinas	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas	Kepemimpinan yang Kondusif
6	Dokumen/Data Dukung RTP Dinas	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko	Kepemimpinan yang Kondusif
7	Dokumen Kontrak Pegawai Non-PNS Dinas	Masih banyaknya pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara/pegawai kontrak)	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan kebutuhan

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh

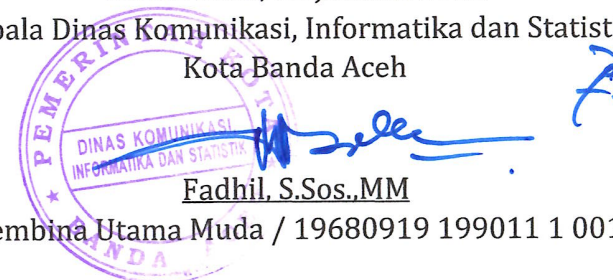
Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Tahun Penilaian : 2022

No.	Sub unsur	Hasil Reviu		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	-	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	-	-	Kurang Memadai	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan	Kurang Memadai	Banyak pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah mengisi posisi/jabatan
				Kurang Memadai	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala	Kurang Memadai	Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala
3	Kepemimpinan yang kondusif	-	-	Kurang Memadai	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan	Kurang Memadai	Belum adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan
				Kurang Memadai	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan	Kurang Memadai	Penerapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh pimpinan
				Kurang Memadai	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas	Kurang Memadai	Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana kerja Pemkot/Dinas
				Kurang Memadai	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko	Kurang Memadai	Pimpinan belum sepenuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam mengelola resiko

4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Kurang Memadai	Masih banyaknya pegawai yang bersifat adhoc (sementara/pegawai kontrak)	Kurang Memadai	Masih banyaknya pegawai yang bersifat adhoc (sementara/pegawai kontrak)
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	-	-	Memadai	-	Memadai	-
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	-

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2017-2022
Sumber Data	: RPJM Tahun 2017-2022
Visi	: Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah
Misi Strategis RPJMD	1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat 4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat <b>5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b> 6. Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan 7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan Strategis RPJMD	1.1 Terwujudnya Nilai-Nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh 2.1 Mewujudkan Pendidikan Kota Banda Aceh yang Bermutu, Berdaya Saing, berkarakter islami dan berprestasi 3.1 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 4.1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat <b>5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b> 6.1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan 7.1 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



Sasaran RPJMD	1.1.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam 2.1.1 Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan 3.1.1 Peningkatan kesejahteraan masyarakat 4.1.1 Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat 5.1.1 Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi <b>5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</b> 6.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni 6.1.2 Mitigasi kebencanaan yang tangguh 6.1.3 Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan 7.1.1 Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak 7.1.2 Pengendalian pertumbuhan penduduk
<b>Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda</b>	5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
IKU Sasaran RPJMD	1.1.1.1 Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh 2.1.1.1 Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah 3.1.1.1 Angka Kemiskinan 3.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka 3.1.1.3 Persentase Peningkatan Nilai Investasi 4.1.1.1 Persentase Indikator Kota Sehat yang Terpenuhi 5.1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) <b>5.1.2.1 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik</b> 6.1.1.1 Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni 7.1.1.1 Indeks Pembangunan Gampong (IPG) 7.1.1.2 Persentase Indikator Kota Layak Anak yang Dipenuhi
<b>Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda</b>	5.1.2.1 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Prioritas pembangunan dan program unggulan	-
<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
Nama Dinas Terkait	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan</p> <p>5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>Sasaran</p> <p>5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p> <p>IKU</p> <p>5.1.2.1 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	
Tahun Penilaian	:	2022	
Periode yang dinilai	:	Periode Renstra Tahun 2017-2022	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	
Sumber Data	:	Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh	
Tujuan Strategis	:	Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	
Sasaran Strategis	:	1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	
IKU Renstra OPD	:	<b>IKU</b>	<b>Tahun 2022</b>
		1. Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	25%
		2. Persentase Website OPD yang Aktif	80%
		3. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	55%
Program	:	1. Informasi & Komunikasi Publik 2. Aplikasi Informatika 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
Informasi Lain		-	



<p>Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan Penilaian Risiko</p>	<p><b>Tujuan Strategis :</b>  <b>Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh</b></p> <p><b>Sasaran Strategis :</b>  <b>1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi</b>  <b>2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik</b></p> <p><b>IKU Strategis :</b>  <b>1. Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi</b>  <b>2. Persentase Website OPD yang Aktif</b>  <b>3. Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan</b></p>
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

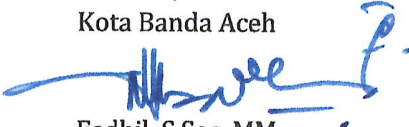
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	
Tahun Penilaian	:	2022	
Periode yang dinilai	:	Periode Renstra Tahun 2017-2022	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	
Sumber Data	:	Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh	
Tujuan Strategis	:	Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	
Program Diskominfo dan Kegiatan Utama	:	<p>Program :</p> <p>1. Program Informasi &amp; Komunikasi Publik</p> <p>2. Program Aplikasi Informatika</p> <p>3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p> <p>Kegiatan</p> <p>1.1 Kegiatan Pengelolaan informasi &amp; Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota</p> <p>2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota</p> <p>3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota</p> <p>4.1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota</p> <p>4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota</p>	
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	:	<p>1.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</p> <p>1.1.2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</p> <p>1.1.3 Pelayanan Informasi Publik</p> <p>1.1.4 Layanan Hubungan Media</p> <p>1.1.5 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan</p> <p>1.1.6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</p> <p>1.1.7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</p> <p>2.1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</p> <p>2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota</p> <p>2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</p> <p>2.2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</p> <p>2.2.4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>2.2.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</p> <p>2.2.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</p> <p>3.1.1 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</p> <p>3.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</p> <p>4.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</p> <p>4.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota</p>	<p>12 Aspirasi 600 Berita</p> <p>12 Permohonan 5 Media 10 Kali 45 Orang 1 Kali</p> <p>44 SKPD 47 Orang</p> <p>1 Tahun 1 Dokumen 3 Aplikasi</p> <p>2 Jenis</p> <p>1 Laporan</p> <p>68 Orang</p> <p>34 OPD</p> <p>1 Tahun</p> <p>200 Surat</p>
Informasi Lain		-	

Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Informasi &amp; Komunikasi Publik</li><li>2. Program Aplikasi Informatika</li><li>3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li><li>4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li></ol> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Kegiatan Pengelolaan informasi &amp; Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li><li>2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota</li><li>2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota</li><li>3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota</li><li>4.1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota</li><li>4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota</li></ol> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</li><li>1.1.2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</li><li>1.1.3 Pelayanan Informasi Publik</li><li>1.1.4 Layanan Hubungan Media</li><li>1.1.5 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan</li><li>1.1.6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</li><li>1.1.7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</li><li>2.1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</li><li>2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota</li><li>2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</li><li>2.2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</li><li>2.2.4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</li><li>2.2.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</li><li>2.2.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</li><li>3.1.1 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</li><li>3.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</li><li>4.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</li><li>4.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota</li></ol>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.MM

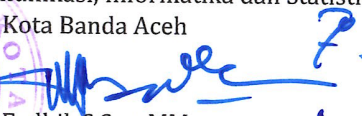
Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



Identifikasi Risiko Strategis Pemda

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Tahun Penilaian : 2022  
Periode yang dinilai : RPJMD 2017-2022  
Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.22.16.19.01	Walikota Banda Aceh	Rendahnya Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemerintahan Berbasis Elektronik	Internal	C	1. Tidak Efesiennya Belanja TIK 2. Pengelolaan TIK Secara Sendiri-sendiri (Silo) 3. Tidak terintegrasinya Sistem Informasi/Aplikasi Pemerintah Kota Banda Aceh	Walikota, OPD Terkait, Masyarakat

Banda Aceh, 12 Januari 2022  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh  
  
Fadhil, S.Sos.MM  
Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Tahun Penilaian : 2022  
Periode yang dinilai : Periode Renstra 2017-2022  
Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
Sasaran strategis OPD : 1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi  
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh									
	Sasaran Strategis 1 : Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Minimnya Data Statistik Sektoral yang tersedia dan bisa dikelola oleh Diskominfotik	RSO.22.20.19.01	Kadis Kominfotik	Belum bakunya standar data yang digunakan serta kurangnya petugas ahli	Internal	C	Tidak tersedianya data statistik sektoral yang lengkap, baku dan terbarukan	Masyarakat dan Pemko Banda Aceh
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	1. Persentase Website OPD yang Aktif	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.22.16.19.02	Kadis Kominfotik	OPD kurang aktif di dalam melakukan update berita dan informasi melalui website yang dikelola	Internal	C	Informasi kinerja OPD dan Pemerintah Kota yang bisa diterima oleh masyarakat tidak update	Masyarakat dan Pemko Banda Aceh
		2. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.22.16.19.03	Kadis Kominfotik	Terbatasnya SDM , Sarana dan Prasarana TIK serta lemahnya koordinasi dan Integrasi TIK	Internal	C	Tidak tercapainya target Indeks Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota	Pemko Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Januari 2022  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh  
Fadhil, S.Sos.MM  
Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Tahun Penilaian : 2022  
Periode yang dinilai : Periode Renstra 2017-2022  
Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
Sasaran strategis OPD : 1. Tersedianya Data Statistik Sektor yang Berkualitas dan Terintegrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko yang Teridentifikasi				Penyebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.01	Kadis Kominfo/ Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.02		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.03		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurang baiknya respon yang diberikan terhadap aspirasi atau pengaduan	ROO.22.16.19.04		Evaluasi hanya dilakukan saat ada aspirasi atau pengaduan saja			Respon yang diberikan kepada warga tidak memuaskan	
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.05	Kadis Kominfo/ Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.06		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.07		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Minimnya keberagaman jumlah topik dan tema konten berita, informasi publik dan liputan sangat terbatas dan kurang menarik	ROO.22.16.19.08		Jumlah tenaga jurnalis/ rilis/ desain grafis yang dimiliki terbatas			Jumlah rilis berita, informasi dan liputan tidak mencapai target	
3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.09	Kadis Kominfo/ Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.10		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait Informasi Publik			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.11		Kurangnya SDM di dalam mengelola permohonan informasi publik yang diterima			Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan permohonan informasi publik	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses verifikasi dan respon permohonan informasi publik	ROO.22.16.19.12		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas permohonan informasi publik			Informasi publik yang dimohon tidak lengkap direspon, diverifikasi dan diberikan	
4	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.13	Kadis Kominfo/ Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.14		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait informasi yang harus didesiminasikan			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.15		Kurangnya SDM di dalam mendesiminasikan informasi			Tidak terpenuhinya target laporan informasi yang didesiminasikan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Terbatasnya pemahaman dan tenaga SDM di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan	ROO.22.16.19.16		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas media yang digunakan			Kurang maksimal di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan	
5	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh Informasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.17	Kadis Kominfo/ Kabid Smart City	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfo dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.18		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan sosialisasi			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.19		Kurangnya SDM di dalam melakukan proses pelaporan pelaksanaan sosialisasi			Tidak terpenuhinya target pelaksanaan sosialisasi	
			Pemantauan dan Evaluasi	Belum maksimalnya kriteria penetapan lokasi yang akan dilakukan sosialisasi	ROO.22.16.19.20		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas lokasi sosialisasi			Target lokasi yang dipilih sebagai tempat sosialisasi tidak sesuai dengan sasaran	



6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.21	Kadis Kominfotik/Kabid Smart City	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.22		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD dan stakeholder lainnya terkait pelaksanaan pelatihan			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.23		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target pelaksanaan pelatihan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Adanya pembatasan prosesi pelatihan secara tatap muka	ROO.22.16.19.24		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas SDM yang diberikan pelatihan			Tidak terlaksananya prosesi pelatihan SDM	
7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.25	Kadis Kominfotik/Kabid PIP	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan Masyarakat
			Perencanaan	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.26		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD dan stakeholder lainnya terkait pelaksanaan pelatihan KIG			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.27		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target pelaksanaan pelatihan KIG	
			Pemantauan dan Evaluasi	Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pelatihan KIG	ROO.22.16.19.28		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas KIG yang diberikan pelatihan			Anggaran tidak terserap secara maksimal	
8	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.29	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan layanan jaringan intra	ROO.22.16.19.30		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait dengan layanan jaringan intra yang diberikan			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.31		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target layanan jaringan intra yang diberikan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Adanya pembatasan terkait dengan pemeliharaan layanan jaringan intra	ROO.22.16.19.32		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas jaringan intra yang diberikan			Layanan Jaringan Intra belum maksimal	
9	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.33	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan dokumen proses bisnis yang harus disiapkan	ROO.22.16.19.34		Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait dengan pembuatan proses bisnis			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.35		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target dokumen proses bisnis yang disiapkan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Proses Bisnis yang harus disiapkan tidak bisa diselesaikan	ROO.22.16.19.36		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada kuantitas aplikasi yang dibuat			SDM Pemda tidak mampu untuk membuat dokumen proses bisnis	
10	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.37	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan pusat data yang harus disiapkan	ROO.22.16.19.38		Kurangnya perencanaan spesifikasi pusat data yang sesuai dengan standar			Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.39		Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan terstruktur			Tidak terpenuhinya target standar pusat data yang diharapkan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Pemeliharaan pusat data yang dimiliki kurang maksimal	ROO.22.16.19.40		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada layanan pusat data yang diberikan			Layanan pusat data yang dimiliki tidak maksimal digunakan oleh OPD	
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.41	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Masih rendahnya kualitas perencanaan SPBE	ROO.22.16.19.42		Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan kelengkapan dokumen arsitektur SPBE Kota			Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dengan perencanaan Arsitektur TIK Kota	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.43		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Kota Dokumen Perencanaan tidak matang dan terstruktur	
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak terpenuhinya target dokumen arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	ROO.22.16.19.44		Minimnya pemahaman OPD terkait dengan dokumen arsitektur SPBE			Kondisi sarana dan Prasarana TIK yang dimiliki OPD tidak sesuai dengan standar yang direncanakan / ditetapkan	
12	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.45	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Perencanaan pengembangan aplikasi khusus tidak lengkap	ROO.22.16.19.46		Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dengan prosedur dan kelengkapan pengembangan aplikasi khusus			Aplikasi khusus yang dikembangkan tidak memiliki dokumen perencanaan	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.47		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Tidak terpenuhinya target aplikasi khusus yang sesuai standar	
			Pemantauan dan Evaluasi	masih banyak OPD yang tidak layak di dalam mengembangkan aplikasi khusus	ROO.22.16.19.48		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada jumlah aplikasi khusus yang dikembangkan			Aplikasi khusus yang dikembangkan tidak sesuai standar	

13	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.22.16.19.49	Kadis Kominfotik/Kabid E-Government	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Dokumen Perencanaan penguatan command center Kota Banda Aceh tidak lengkap	R00.22.16.19.50		Kurangnya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal prosedur dan kelengkapan Penguatan Command Center Kota			Command Center Kota tidak memiliki dasar perencanaan yang lengkap	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19.51		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Penyerapan anggaran tidak maksimal	
			Pemantauan dan Evaluasi	Command Center Kota belum memenuhi standar yang diharapkan	R00.22.16.19.52		Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada pengadaan sarana tanpa pertimbangan standar yang diharapkan			Tidak terpenuhinya target penguatan command center kota sesuai standar	
14	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.22.16.19.53	Kadis Kominfotik/Kabid Statistik	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Kurangnya pemahaman akan mutu integrasi statistik daerah	R00.22.16.19.54		Kurangnya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait lainnya perihal peningkatan perencanaan mutu integrasi statistik daerah			Rendahnya kualitas mutu dokumen perencanaan yang dilaksanakan	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19.55		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Penyerapan anggaran tidak maksimal	
			Pemantauan dan Evaluasi	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang bertugas di dalam proses integrasi mutu statistik daerah	R00.22.16.19.56		Belum maksimalnya bimtek yang diberikan kepada SDM integrasi statistik daerah			OPD tidak mampu di dalam melengkapi mutu integrasi data statistik daerah yang diharapkan	
15	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	R00.22.16.19.57	Kadis Kominfotik/Kabid Statistik	Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya proses keseluruhan terkait pertanggungjawaban anggaran	Diskominfotik dan OPD
			Perencanaan	Belum terpenuhinya OPD yang menyerahkan dataset yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	R00.22.16.19.58		Belum maksimalnya peran dan fungsi forum data			Belum optimalnya pengelolaan, integrasi dan pengambilan keputusan melalui data sektoral	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap	R00.22.16.19.59		Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap			Penyerapan anggaran tidak maksimal	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurangnya pemahaman terhadap dataset yang dimiliki	R00.22.16.19.60		Belum maksimalnya bimtek yang diberikan kepada OPD terkait dengan proses verifikasi, validasi, analisis dan update dataset yang dimiliki			Dataset OPD tidak bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	

Banda Aceh, 12 Januari 2022  
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Kota Banda Aceh  
 Fauzil S.Sos, MM  
 Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun Penilaian : 2022

Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh					
1	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.22.16.19.01	3	4	12
II Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					
1	Minimnya Data Statistik Sektoral yang tersedia dan bisa dikelola oleh Diskominfotik	RSO.22.20.19.01	3	3	9
2	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.22.16.19.02	4	3	12
3	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.22.16.19.03	3	4	12
III Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.01	2	3	6
2	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.02	2	2	4
3	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.03	2	2	4
4	Kurang baiknya respon yang diberikan terhadap aspirasi atau pengaduan	ROO.22.16.19.04	2	3	6
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.05	2	3	6
6	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.06	2	2	4
7	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.07	2	2	4
8	Minimnya keberagaman jumlah topik dan tema konten berita, informasi publik dan liputan sangat terbatas dan kurang menarik	ROO.22.16.19.08	4	4	16
9	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.09	2	2	4
10	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.10	2	2	4
11	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.11	2	2	4
12	Kurangnya tenaga SDM di dalam proses verifikasi dan respon permohonan informasi publik	ROO.22.16.19.12	2	2	4
13	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.13	2	2	4
14	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.14	2	2	4
15	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.15	2	2	4
16	Terbatasnya pemahaman dan tenaga SDM di dalam mengidentifikasi media informasi yang harus didesiminasikan	ROO.22.16.19.16	2	2	4
17	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.17	2	2	4
18	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.18	2	2	4



19	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.19	2	2	4
20	Belum maksimalnya kriteria penetapan lokasi yang akan dilakukan sosialisasi	ROO.22.16.19.20	2	2	4
21	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.21	2	2	4
22	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.22	2	2	4
23	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.23	2	2	4
24	Adanya pembatasan prosesi pelatihan secara tatap muka	ROO.22.16.19.24	2	2	4
25	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.25	2	2	4
26	Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab	ROO.22.16.19.26	2	2	4
27	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.27	2	2	4
28	Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pelatihan KIG	ROO.22.16.19.28	2	2	4
29	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.29	2	1	2
30	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan layanan jaringan intra	ROO.22.16.19.30	2	2	4
31	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.31	2	2	4
32	Adanya pembatasan terkait dengan pemeliharaan layanan jaringan intra	ROO.22.16.19.32	3	3	9
33	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.33	2	2	4
34	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan dokumen proses bisnis yang harus disiapkan	ROO.22.16.19.34	4	2	8
35	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.35	2	2	4
36	Proses Bisnis yang harus disiapkan tidak bisa diselesaikan	ROO.22.16.19.36	2	2	4
37	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.37	2	2	4
38	Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan pusat data yang harus disiapkan	ROO.22.16.19.38	2	2	4
39	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.39	2	1	2
40	Pemeliharaan pusat data yang dimiliki kurang maksimal	ROO.22.16.19.40	2	2	4
41	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.41	2	2	4
42	Masih rendahnya kualitas perencanaan SPBE	ROO.22.16.19.42	2	2	4
43	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.43	2	2	4
44	Tidak terpenuhinya target dokumen arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	ROO.22.16.19.44	4	4	16
45	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.45	2	2	4
46	Perencanaan pengembangan aplikasi khusus tidak lengkap	ROO.22.16.19.46	2	2	4
47	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.47	2	2	4
48	masih banyak OPD yang tidak layak di dalam mengembangkan aplikasi khusus	ROO.22.16.19.48	2	2	4
49	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.49	1	2	2
50	Dokumen Perencanaan penguatan command center Kota Banda Aceh tidak lengkap	ROO.22.16.19.50	2	2	4
51	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.51	2	2	4
52	Command Center Kota belum memenuhi standar yang diharapkan	ROO.22.16.19.52	3	3	9
53	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.53	2	2	4
54	Kurangnya pemahaman akan mutu integrasi statistik daerah	ROO.22.16.19.54	3	3	9
55	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.55	3	2	6

56	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang bertugas di dalam proses integrasi mutu statistik daerah	ROO.22.16.19.56	2	2	4
57	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.16.19.57	2	2	4
58	Belum terpenuhinya OPD yang menyerahkan dataset yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	ROO.22.16.19.58	4	4	16
59	Laporan tidak lengkap	ROO.22.16.19.59	2	2	4
60	Kurangnya pemahaman terhadap dataset yang dimiliki	ROO.22.16.19.60	2	2	4

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Banda Aceh

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



### Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh</b>						
1	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.22.16.19.01	12	Walikota	Rendahnya Kepatuhan Atas Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Tidak Efesiennya Belanja TIK 2. Pengelolaan TIK Secara Sendiri-sendiri (Silo) 3. Tidak terintegrasinya Sistem Informasi/Aplikasi Pemerintah Kota Banda Aceh
<b>II Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>						
1	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.22.16.19.02	12	Kadis Kominfotik	OPD kurang aktif di dalam melakukan update berita dan informasi melalui website yang dikelola	Informasi kinerja OPD dan Pemerintah Kota yang bisa diterima oleh masyarakat tidak update
2	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.22.16.19.03	12	Kadis Kominfotik	Terbatasnya SDM , Sarana dan Prasarana TIK serta lemahnya koordinasi dan Integrasi TIK	Tidak tercapainya target Indeks Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota
<b>III Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>						
1	Minimnya keberagaman jumlah topik dan tema konten berita, informasi publik dan liputan sangat terbatas dan kurang menarik	ROO.22.16.19.08	16	Kabid PIP	Jumlah tenaga jurnalis/rilis/desain grafis yang dimiliki terbatas	Jumlah rilis berita, informasi dan liputan tidak mencapai target

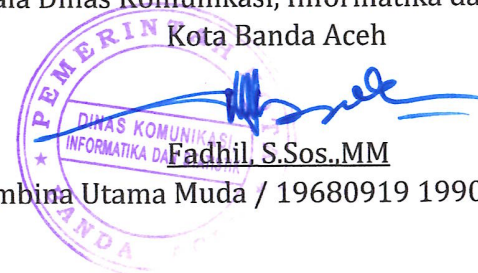


2	Tidak terpenuhinya target dokumen arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	ROO.22.16.19.4 4	16	Kabid E-Government	Minimnya pemahaman OPD terkait dengan dokumen arsitektur SPBE	Kondisi sarana dan Prasarana TIK yang dimiliki OPD tidak sesuai dengan standar yang direncanakan / ditetapkan
3	Belum terpenuhinya OPD yang menyerahkan dataset yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	ROO.22.16.19.5 8	16	Kabid Statistik	Belum maksimalnya peran dan fungsi forum data	Belum optimalnya pengelolaan, integrasi dan pengambilan keputusan melalui data sektoral

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Banda Aceh



Fadhil S.Sos.MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika


No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh</b>							
1	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.22.16.19.01	Pembuatan Form Evaluasi Pelaksanaan Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih rendahnya kepatuhan Implementasi Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Koordinator SPBE Kota Banda Aceh (Sekda) 2. Kepala Dinas Kominfotik 3. OPD Terkait	Triwulan II
<b>II Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</b>							
1	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.22.16.19.02	Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih banyak SKPD yang kurang aktif di dalam melakukan update website	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	Kadis Kominfotik	Triwulan II
2	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.22.16.19.03	Pembuatan Dokumen Arsitektur SPBE dan Dokumen Proses Bisnis Aplikasi Khusus yang Dimiliki	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun masih banyak aspek SPBE yang belum terpenuhi / dilaksanakan	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP, Evaluasi Arsitektur SPBE Kota Banda Aceh yang lengkap	Kadis Kominfotik	Triwulan II



III Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik							
1	Minimnya keberagaman jumlah topik dan tema konten berita, informasi publik dan liputan sangat terbatas dan kurang menarik	ROO.22.16.19.08	Pengajuan Telaahan Staf pengadaan tenaga jurnalis/rilis/desain grafis konten informasi publik	Lambatnya proses rekomendasi dari Pimpinan/OPD terkait untuk perekrutan tenaga jurnalis/rilis/desain grafis konten informasi publik untuk memperbanyak, meningkatkan kualitas informasi publik	Koordinasi ulang kepada Pimpinan serta memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Bagian Prokopim Pemko Banda Aceh	Kabid PIP	Triwulan II
2	Tidak terpenuhinya target dokumen arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	ROO.22.16.19.44	Pembuatan Peraturan Walikota Banda Aceh terkait dengan implementasi Dokumen Arsitektur dan peta rencana SPBE serta membentuk Tim SPBE Kota Banda Aceh	Masih lambat proses pembahasan / finalisasi Peraturan Walikota Banda Aceh terkait penyelenggaraan Arsitektur SPBE Kota Banda Aceh	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	Kabid E-Government	Triwulan III
3	Belum terpenuhinya OPD yang menyerahkan dataset yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	ROO.22.16.19.58	Pembuatan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Banda Aceh	Lambatnya penentuan pemilik data dan jenis data sektoral OPD	Melakukan workshop penentuan pemilik dan jenis data Kota Banda Aceh	Kabid Statistik	Triwulan II

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh

  
Fadhil, S.Sos.,MM  
Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



## RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Peraturan Walikota 4. Keputusan Walikota 5. Workshop/Seminar 6. Bimtek 7. Sosialisasi 8. Website/Portal	Diskominfo, OPD Terkait	Kemenpan-RB, Pemerintah Aceh, Walikota, OPD Terkait, Masyarakat, Komunitas	Triwulan II	April 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat
2	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Keputusan Walikota 4. Workshop 5. Bimtek 6. Sosialisasi 7. Website	Diskominfo	SKPD, Masyarakat, Komunitas	Triwulan II	Juni 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat
3	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP, Evaluasi Arsitektur SPBE Kota Banda Aceh yang lengkap	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Workshop 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Laporan	Diskominfo	SKPD, Komunitas	Triwulan II	Mei 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat dan finalisasi dokumen

4	Koordinasi ulang kepada Pimpinan serta memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Bagian Prokopim Pemko Banda Aceh	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Workshop 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Website	Diskominfo	SKPD, Komunitas, Masyarakat	Triwulan II	Juni 2022	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dan Dokumentasi berupa notulen
5	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Keputusan Walikota 4. Bimtek 5. Sosialisasi 6. Laporan	Diskominfo	SKPD	Triwulan III	September 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat dan finalisasi laporan
6	Melakukan workshop penentuan pemilik dan jenis data Kota Banda Aceh	1. Surat 2. Rapat Koordinasi 3. Bimtek 4. Usulan Koordinator Forum Data 5. Keputusan Walikota 6. Sosialisasi 7. Laporan	Diskominfo	SKPD	Triwulan II	April 2022	Telah Dilakukan sesuai dengan Rencana Aksi awal tahun yang dibuat dan finalisasi laporan

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.MM  
Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

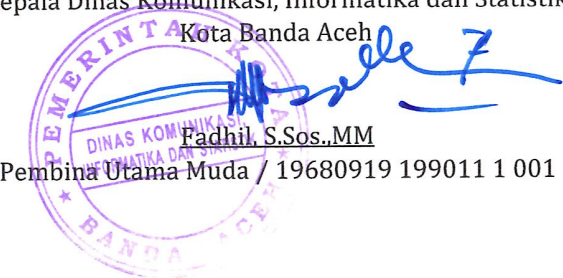
Nama Dinas : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Tahun Penilaian : 2022  
Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Sekretaris Daerah (Koordinator SPBE)	Maret, Mei, Oktober, Desember 2022	Maret, Mei, Oktober, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
2	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kadis Kominfotik	April, Oktober, Desember 2022	April, Oktober, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
3	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP, Evaluasi Arsitektur SPBE Kota Banda Aceh yang lengkap	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kadis Kominfotik	April, Oktober, Desember 2022	April, Oktober, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
4	Koordinasi ulang kepada Pimpinan serta memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Bagian Prokopim Pemko Banda Aceh	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kabid PIP	Mei, November, Desember 2022	Mei, November, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
5	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kabid E-Government	Mei, November, Desember 2022	Mei, November, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
6	Melakukan workshop penentuan pemilik dan jenis data Kota Banda Aceh	Konfirmasi persiapan dan laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kabid Statistik	Mei, November, Desember 2022	Mei, November, Desember 2022	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Banda Aceh



Fadhil, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001



### PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Dinas : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

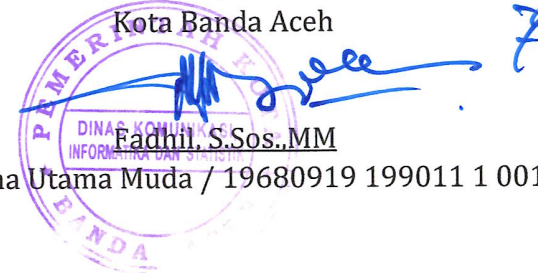
No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
I	Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh									
1	Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah	RSP.22.16.19.01	Dec-22	Tidak Terlaksananya Implementasi Sesuai Rencana Aksi	Nilai Indeks SPBE Rendah	Terjadi	Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Triwulan II	April 2022	Menunggu Penilaian Asessor Eksternal (Kemenpan-RB)
II	Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik									
1	Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update	RSO.22.16.19.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID	Triwulan II	Juni 2022	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti
2	Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di OPD	RSO.22.16.19.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan Arsitektur SPBE Kota yang lengkap	Triwulan II	Mei 2022	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti

III Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik										
1	Minimnya keberagaman jumlah topik dan tema konten berita, informasi publik dan liputan	ROO.22.16.19.08	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko Banda Aceh	Triwulan II	Juni 2022	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti
2	Tidak terpenuhinya target dokumen arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	ROO.22.16.19.44	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan evaluasi secara berkala dan meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota	Triwulan III	September 2022	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti
3	Belum terpenuhinya OPD yang menyerahkan dataset yang bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan diupdate	ROO.22.16.19.58	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan optimalisasi dan maksimalisasi pemeliharaan jaringan intra sesuai dengan anggaran yang tersedia	Triwulan II	April 2022	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Banda Aceh



Fadhil S.Sos., MM

Pembina Utama Muda / 19680919 199011 1 001

POHON KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK																																																																													
VISI		Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah																																																																											
MISI		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik																																																																											
TUJUAN RPJM		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik																																																																											
SASARAN RPJM		Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)																																																																											
IKU RPJM		Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik																																																																											
TUJUAN SKPD		Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Berintegrasi dalam Kota Banda Aceh																																																																											
SASARAN SKPD		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi dan Pengelolaan Informasi Publik																								Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi																																																			
Indikator 90_2019		Persentase Website OPD yang Aktif											Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan											Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu																																																					
Program 90_2019		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA											PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																																																	
KEGIATAN 90_2019		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota																																														
Sub Kegiatan 90_2019		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Pelayanan Informasi Publik		Layanan Hubungan Media		Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan		Manajemen Komunikasi Krisis		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kab/Kota		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota		Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Membangun Metadata Statistik Sektoral		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Pengembangan Infrastruktur		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	
Indikator capaian Kepmendagri Nomor 050-3728 Tahun 2020		Jumlah Regulasi yang diterbitkan		Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon		Jumlah Informasi dan Agenda Kegiatan pemda yang dilaksanakan		Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi		Jumlah Media Komunikasi Publik yang digunakan		Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi		Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasiakan Informasi		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh		Jumlah berita Hoax dan disinformasi yang terklarifikasi		Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Dukungan kontribusi terhadap Komisi Informasi Daerah yang tersedia		Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan		jumlah nama sub domain bandaacehkota.go.id		jumlah nama sub domain bandaacehkota.go.id		Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah		Jumlah SDM Pemda yang Dilaith Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK		terlaksananya SPBE yang sesuai dengan peta jalan/arsitektur spbe		Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data		Jumlah cakupan layanan komunikasi intra (WAN) pemerintah		pengelolaan sistem kemandan informasi pemerintah		Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota		Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan		Jumlah cakupan layanan penghubung (WAN) pemerintah		Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan		persentase ASN yang mengikuti bimtek TIK		Jumlah pejabat struktural yang mengikuti GCIO		Jumlah Laporan Movev SPBE		tersedianya kebijakan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi		terlaksananya kajian/analisis/ audit kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah		Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan		terlaksananya layanan kemandan informasi		Jumlah Surat Sandi yang Dikelola		Persentase penyajian data dan informasi statistik		Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah		Tersedianya metadata statistik		Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya		Tersedianya infrastruktur yang memadai		Tersedianya regulasi penyelenggara otoritas statistik	
Output Kepmendagri Nomor 050-3728 Tahun 2020		4 buah		12 Aspirasi		8 kegiatan		600 Berita		4 kanal medsos		12 Permohonan		5 media		10 Kali		12 berita		45 orang		1 Kegiatan		1 kali		SK penetapan subdomain		SK penetapan subdomain		44 SKPD		47 Orang		evaluasi SPBE		1 Tahun		SKPD		sistem kemandan informasi pemerintah yang aman		1 Dokumen		3 Aplikasi		SKPD		2 Jenis		15%		4 orang		1 Laporan		Produk Hukum/SOP		Dokumen		1 Tahun		data/webs ite/aplikasi pemerintah yang terjamin keamanannya		200 Surat		Laporan		68 Orang		Data/Laporan		34 OPD		Aplikasi/Peralatan		Produk Hukum	